

PEDOMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2016, LD NO. 10 SERI E, 59 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RUMAH SUSUN

ABSTRAK:

- untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal diperlukan peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maka dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah susun dengan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk peraturan daerah tentang rumah susun.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan jenis rumah susun, perencanaan rumah susun, Pembangunan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan, peningkatan kualitas, pengendalian, larangan, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana,

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2016.
- Penjelasan 13 halaman.
-